

Penyerapan Tenaga Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Upah Minimum Di Indonesia

Bambang Sujagad Susanto*

* STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

Article Info	Abstract
Keywords: <i>Labor absorption, Human development index and Provincial minimum wage.</i>	<i>This study aims to examine and analyze the effect of labor absorption and human development index on provincial minimum wage in five provinces of Indonesia. Data used a panel data which combines the data time series and cross section data. The method used is pooled least squares method is analyzed by software Eviews 7. The results showed that the effect of labor absorption on provincial minimum wage were negative, so if there is an increase in labor absorption, it will cause a decrease in the provincial minimum wage and improvement of the human development index will have an impact also on the increase in the provincial minimum wage.</i>
Corresponding Author: profbambang.kadin@gmail.com	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penyerapan tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia terhadap upah minimum provinsi di lima provinsi Indonesia. Data yang digunakan merupakan data panel yaitu gabungan antara data <i>time series</i> dan data <i>cross section</i>. Metode yang digunakan adalah metode</p>

pooled least square yang dianalisis dengan *software Eviews 7*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap upah minimum provinsi adalah negatif, sehingga apabila terjadi kenaikan pada penyerapan tenaga kerja maka akan menyebabkan penurunan pada upah minimum provinsi dan peningkatan indeks pembangunan manusia akan memberikan dampak peningkatan juga pada upah minimum provinsi.

©2014 APJM. All rights reserved.

Pendahuluan

Dalam Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2013, upah minimum didefinisikan sebagai upah terkecil yang dibayar secara tetap, bukan termasuk tunjangan tidak tetap yakni tunjangan transpor dan tunjangan makan yang dibayar sesuai dengan kehadiran. Menurut Magruder (2013), upah minimum dapat berkoordinasi dengan pembangunan pada ekuilibrium upah yang tinggi. Penelitiannya menggunakan data di Indonesia tahun 1990-an, ditemukan bahwa upah minimum meningkat dengan cara bervariasi. Armstrong dan Taylor (2014) mengatakan bahwa titik awal dari hubungan kerja adalah suatu usaha seorang karyawan memberikan keterampilan dan usahanya bagi pengusaha/pemberi kerja dengan imbalan bagi karyawan berupa gaji atau upah (tawar-menawar gaji kerja).

Dampak inflasi terhadap perekonomian Indonesia tahun 2013 didominasi oleh penurunan subsidi BBM dan diperburuk oleh kebijakan perdagangan yang terbatas serta fluktuasi musiman yang terkait dengan perayaan Idul Fitri (ILO, 2013). Langkah yang diambil Pemerintah tanggal 22 Juni 2013 untuk mengurangi subsidi solar sebesar Rp 1.000 per liter dan subsidi bensin sebesar Rp 2.000 per liter menyebabkan peningkatan inflasi secara tajam, dan penyesuaian harga kemungkinan akan terus berlanjut hingga tahun 2014 (ILO, 2013).

Kekhawatiran juga muncul terkait risiko inflasi dari sisi penawaran akibat kenaikan upah minimum tahun 2013 (World Bank, 2013). Dalam hal ini, Instruksi Presiden (Nomor 9/2013) telah dikeluarkan baru-baru ini yang memberikan

panduan tentang kenaikan upah minimum tahunan kepada dewan pengupahan tingkat provinsi dan kabupaten (ILO, 2013). Instruksi Presiden ini berupaya mengatasi masalah yang terkait dengan ketidakpastian kenaikan upah bagi investor dengan memberikan panduan tentang hubungan antara kenaikan upah minimum tahunan, inflasi, dengan produktivitas (ILO, 2013). Akan tetapi, tren keseluruhan terkait kenaikan upah tidak menunjukkan masalah inflasi yang mendorong kenaikan upah hingga saat ini (ILO, 2013).

Nicholson dan Snyder (2012) menyatakan bahwa upah minimum adalah salah satu komponen biaya produksi, jika terjadi peningkatan upah maka akan meningkatkan biaya produksi. Menurut Lemos (2004), harga yang lebih tinggi merupakan respon jelas terhadap kenaikan upah minimum, akan tetapi kerja karyawan tidak akan menurun jika perusahaan mampu melewati harga biaya yang lebih tinggi terkait dengan goncangan upah minimum. Terdapat dikotomi kepentingan atas kenaikan upah, di satu sisi pekerja menginginkan upah yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup baik pada dirinya maupun keluarganya. Di sisi lain, pengusaha menginginkan upah pekerja konstan sehingga biaya produksinya tidak meningkat dan harga produk dapat bersaing.

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara. Menurut Schulten (2012), upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja, tingkat perlindungan upah minimum bergantung pada cakupan perundingan bersama, kestabilan di banyak negara-negara terjadi karena melalui perpanjangan kesepakatan bersama. Margolis (2014) menyatakan bahwa upah minimum dapat melindungi pekerja dari tawar-menawar yang merugikan pekerja karena eksploitasi bentuk kekuasaan. Levin-Waldman (2014) menambahkan bahwa efek kesejahteraan positif berhubungan dengan upah minimum, pada asumsi ekonomi makro umum, upah yang lebih tinggi akan menawarkan lebih banyak daya beli pekerja, sehingga akan menuntut pekerja lebih banyak barang dan jasa. Ketika mereka melakukan hal ini, bisnis akan menghasilkan lebih banyak, dan mempekerjakan lebih banyak pekerja, sehingga memiliki hasil penawaran alami atas upah di seluruh bagian.

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha (Nicholson dan Snyder, 2012). Keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan suatu posisi tertentu yang terbentuk oleh adanya interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja (Nicholson dan Snyder, 2012). Todaro dan Smith (2012) menyatakan bahwa dalam pasar persaingan sempurna (*perfect competition*), tidak ada satupun produsen dan konsumen memiliki pengaruh atau kekuatan yang cukup besar mendikte harga-harga input maupun *output*, tingkat penyerapan tenaga kerja (*level of employment*) dan harganya (tingkat upah) ditentukan secara bersamaan oleh segenap harga-harga *output* dan faktor-faktor produksi selain tenaga kerja.

Perkembangan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 yang ditampilkan pada Tabel 1 menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu rasio antara angkatan kerja dibandingkan dengan seluruh penduduk usia kerja (umur 15 tahun ke atas) tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan yaitu dari 68,08 persen pada tahun 2009 menjadi 68,27 persen pada tahun 2010. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka juga mengalami penurunan yang terus menerus yaitu dari 7,41 persen tahun 2011 menjadi 6,07 persen pada tahun 2012. Menurunnya jumlah pengangguran mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi telah dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1
Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia

No	Jenis Kegiatan	2009	2010	2011	2012
		Agustus	Agustus	Agustus	Agustus
1	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas	170.129.650	172.615.190	175.120.454	177.514.211
2	Angkatan Kerja	115.824.992	117.844.141	116.825.488	120.317.653
	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,08	68,27	66,71	67,78
	b. Bekerja	107.070.256	109.589.715	108.165.761	113.011.621
	c. Pengangguran Terbuka	8.754.736	8.254.426	8.659.727	7.306.032
	d. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,56	7,00	7,41	6,07

No	Jenis Kegiatan	2009	2010	2011	2012
		Agustus	Agustus	Agustus	Agustus
3	Bukan Angkatan Kerja	54.304.658	54.771.049	58.294.966	57.196.558
	a. Sekolah	12.361.043	13.171.035	13.747.873	14.416.167
	b. Mengurus Rumah Tangga	33.464.426	32.861.946	35.738.368	34.330.319
	c. Lainnya	8.479.189	8.738.068	8.808.725	8.450.072

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012.

Ukuran yang paling banyak digunakan dari status komparatif pembangunan sosial ekonomi disajikan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP-*the United Nations Development Program*) dalam seri Laporan tahunan Pembangunan Manusia (Todaro dan Smith, 2012). Inti dari laporan ini, yang dimulai pada tahun 1990, adalah pembangunan dan perbaikan yang informatif yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini disukai dengan alasan bahwa hal ini menunjukkan tidak memadainya indeks lain seperti GNP (Todaro dan Smith, 2012).

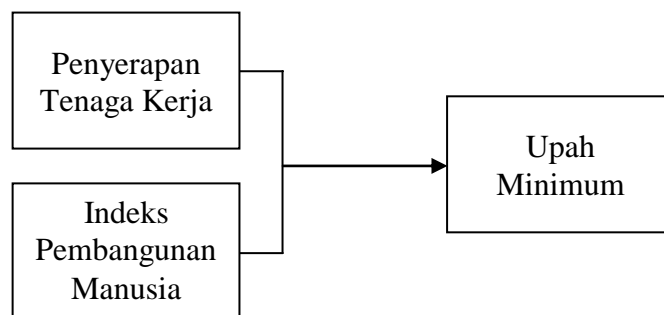
Menurut Todaro dan Smith (2012) IPM adalah indeks yang mengukur pembangunan ekonomi nasional sosial, didasarkan pada penggabungan tindakan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. Pada bulan November 2010, UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia Baru (NHDI- *New Human Development Index*), dimaksudkan untuk mengatasi beberapa kritik dari IPM. Indeks masih didasarkan pada standar hidup, pendidikan, dan kesehatan. Tetapi memiliki delapan perubahan penting, masing-masing dengan kekuatan tetapi juga beberapa kelemahan potensial.

1. Pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita menggantikan produk domestik bruto (PDB) per kapita.
2. Indeks pendidikan dirombak.
3. Diharapkan tingkat pendidikan, komponen baru lainnya, agak lebih ambigu: itu bukan sebuah prestasi tapi perkiraan PBB. Seperti perbaikan cepat dalam pencapaian pendidikan di beberapa negara. Perhatikan juga bahwa harapan

hidup, merupakan indikator tetap untuk kesehatan, juga merupakan proyeksi berdasarkan kondisi yang berlaku.

4. Dua komponen sebelumnya indeks pendidikan, melek huruf dan partisipasi, sejalan diturunkan.
5. Nilai maksimum pada setiap dimensi meningkat menjadi maksimum diamati daripada diberi *cutoff* yang telah ditetapkan.
6. Nilai minimum untuk pendapatan telah diturunkan.
7. Perbedaan lain kecil adalah bahwa daripada menggunakan logaritma (log) untuk mencerminkan berkurangnya manfaat marjinal pendapatan, NHDI sekarang menggunakan log natural (ln).
8. Kemungkinan perubahan yang paling konsekuensial adalah bahwa NHDI dihitung dengan rata-rata geometris.

Berdasarkan pendahuluan dan kajian teoritik di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh penyerapan tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia terhadap upah minimum provinsi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur?



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode *pooled least square* yang dianalisis dengan *software Eviews 7*. Populasi penelitian ini adalah lima provinsi yang ada di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data berbentuk *times series* dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, dan data *cross-section* yang terdiri atas lima provinsi, sehingga merupakan data panel atau *pooled*

the data yaitu gabungan antara data *times series* (tahun 2009 sampai dengan 2012 = 4 tahun) dengan data *cross-section* (lima provinsi). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi lain yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) Terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP)

Dari hasil uji simultanitas bisa dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja (PTK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upah minimum provinsi (UMP). Nilai probabilitas *t-statistic* sebesar 0.0001 pada α (*level of significance*) 5%, tetapi nilai koefisiennya adalah -0.027872, ini berarti pengaruh dari PTK di lima provinsi terhadap UMP adalah negatif sehingga apabila terjadi kenaikan 1% pada PTK di lima provinsi maka akan menyebabkan penurunan pada UMP di lima provinsi sebesar -0.027872%. Nilai elastisitasnya adalah kurang dari 1, ini berarti pengaruh perubahan PTK terhadap UMP inelastis. Namun perubahannya adalah negatif, sehingga kenaikan PTK menyebabkan penurunan pada UMP dengan persentase kecil. Ini sesuai dengan teori pasar kompetitif yang menyatakan bahwa jumlah permintaan tenaga kerja berhubungan secara negatif terhadap harga atau upah (Mankiw, 2014).

Mankiw (2014) menyatakan bahwa ketika upah minimum dari tenaga kerja tersebut lebih tinggi daripada tingkat upah keseimbangan maka permintaan akan tenaga kerja tersebut oleh pengusaha akan cenderung turun yang berarti kesempatan kerja juga mengalami penurunan. Sebaliknya jika upah minimum dari tenaga kerja tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat upah keseimbangan maka permintaan akan tenaga kerja oleh pengusaha dan kesempatan kerja akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulistiawati pada tahun 2012 bahwa upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi-provinsi di Indonesia dapat diterima, karena secara statistik terbukti. Koefisien

jalur yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah tidak searah, artinya apabila terjadi kenaikan upah, maka berpotensi untuk menurunkan penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang produktivitasnya rendah. Begitu juga halnya penelitian yang dilakukan oleh Gianie pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa adanya perbedaan pengaruh upah minimum di sektor industri dan perdagangan. Pada sektor industri, upah minimum berpengaruh secara negatif dan secara statistik signifikan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Zamrowi pada tahun 2007. Metode Analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel upah secara parsial berhubungan negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya penelitian dengan hasil yang sejalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sidik pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa upah minimum provinsi riil berpengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam artian menurunnya tingkat upah minimum provinsi akan mengakibatkan meningkatnya jumlah permintaan tenaga kerja di sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat. Begitu juga halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Karamanis dan Naxakis (2014), menyatakan bahwa tingkat upah minimum di Yunani tidak memengaruhi tingkat pengangguran dan penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP)

Dari hasil uji simultanitas bisa dilihat bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel upah minimum provinsi (UMP). Nilai probabilitas *t-statistic* sebesar 0.0580 pada α (*level of significance*) 5%. Nilai koefisiennya adalah 15.25711, ini berarti bahwa ketika terjadi peningkatan sebesar 1% pada IPM di lima provinsi, maka akan memberikan dampak peningkatan juga pada UMP di lima provinsi sebesar 15.25711%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Triana (2014) bahwa variabel persentase indeks pembangunan manusia (IPM) dan persentase laju inflasi menunjukkan tanda positif dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap angka upah minimum regional (UMR) berdasarkan propinsi di Indonesia pada periode tahun 2008 sampai 2012. Singh (2012) menemukan bahwa terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan pendapatan perkapita terhadap kemiskinan pada 15 negara bagian di India. Dengan menggunakan alat analisis korelasi dan regresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan pada pengurangan kemiskinan pada 15 negara bagian di India. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014), dalam penelitiannya menemukan bahwa upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Tengah.

Simpulan

Berdasarkan latar belakang, teori-teori yang berkaitan, dan pembuktian hipotesis melalui data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dengan metode ilmiah yang sesuai, serta analisis pembahasan dari hasil pengujian, maka penulis dapat mengambil beberapa simpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) di lima provinsi memiliki dampak negatif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di lima provinsi periode 2009-2012. Ini dikarenakan karena pengaruh dari PTK di lima provinsi terhadap UMP adalah negatif sehingga apabila terjadi kenaikan pada PTK di lima provinsi maka akan menyebabkan penurunan pada UMP di lima provinsi.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lima provinsi memiliki dampak positif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) periode 2009-2012. Ini berarti bahwa ketika terjadi peningkatan pada IPM di lima provinsi, maka akan memberikan dampak peningkatan juga pada UMP di lima provinsi.

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan perbaikan mutu pendidikan dan pelatihan kerja sehingga diharapkan akan semakin membaiknya kualitas pekerja sehingga produktivitasnya akan meningkat seiring dengan meningkatnya upah (*productivity-linked wage system*). Dalam iklim pertumbuhan ekonomi tinggi, peningkatan upah minimum tidak terlalu menjadi persoalan karena pertumbuhan dan pembangunan manusia itu sendiri akan mendorong peningkatan upah, sehingga tingkat upah yang berlaku sama dengan atau di atas upah minimum. Indeks pembangunan manusia juga akan mendorong penciptaan kesempatan kerja yang lebih besar daripada yang hilang karena kebijakan upah minimum. Dengan demikian, perlu adanya kesesuaian antara sistem pengupahan dengan arah atau sasaran kebijakan dan juga diperlukan keterlibatan pihak yang terkait dalam monitoring penetapan besar kecilnya upah yang diberikan kepada pekerja.

Daftar Pustaka

- Armstrong, Michael and Taylor, Stephen. (2014). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. London: Kogan Page Limited.
- Dewi, Fidelia Usmarlini. (2012). Analisis Pembangunan Manusia (*Human Development*) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011. *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- International Labour Organization (ILO) /Kantor Perburuhan Internasional-Jakarta. (2013). *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2013: Memperkuat Peran Pekerjaan Layak dalam Kestaraan Pertumbuhan*.
- Gianie. (2009). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Berpendidikan Rendah di Sektor Industri dan Perdagangan. *Tesis*, Universitas Indonesia.
- Karamanis, Kostas and Charis Naxakis. (2014). Minimum Wage and Unemployment in Greek Labour Market: A Descriptive Analysis. *International Journal of Human Resource Studies*, Vol. 4, No. 4.
- Lemos, Sara. (2004). The Effect of the Minimum Wage on Prices. *IZA Discussion Paper*, No. 1072.
- Levin-Waldman, Oren. (2014). A Conservative Case for the Minimum Wage. *Challenge*. Vol. 57, No. 1, pp. 19-40.

- Magruder, Jeremy R. (2013). Can Minimum Wages cause a Big Push? Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics*, Vol. 100(1), pages 48-62.
- Mankiw, N. Gregory. (2014). *Principles of Microeconomics*. Mason, OH: Cengage Learning.
- Margolis, David. (2014). Introducing a Statutory Minimum Wage in Middle and Low Income Countries. *IZA World of Labor*, pp.1-10.
- Nicholson, Walter and Christopher Snyder. (2012). *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions*. Mason, OH: South-Western, Cengage Learning.
- Schulten, Thorsten. (2012). European Minimum Wage Policy: A Concept for Wage-led Growth and Fair Wages in Europe. *International Journal of Labour Research*, Vol. 4, Issue 1.
- Sidik, Fajar. (2012). Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri dan Perdagangan, Hotel dan Restoran di Pulau Jawa pada Era Otonomi Daerah. *Skripsi*, Institut Pertanian Bogor.
- Singh, Ranbir. (2012). Human Development Index and Poverty Linkages. *International Journal of Marketing and Technology*. Volume 2, Issue 5.
- Sulistiawati, Rini. (2012). Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksos*, Volume 8, Nomor 3, hh. 195-211.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith. (2012). *Economic Development*. Boston: Pearson.
- Triana, Novia Ulfa. (2014). Penerapan Analisis Regresi Panel pada Pemodelan Angka Upah Minimum Regional (UMR) Propinsi di Indonesia pada Periode Tahun 2008-2012. *Jurnal Mahasiswa Statistik*, Vol 2, No 5. pp. 357-360.
- World Bank (2013). *Indonesia Economic Quarterly: Continuing Adjustment-October 2013*. World Bank, Jakarta.
- Zamrowi M. Taufik. 2007. "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil" *Tesis*, Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.

